

## IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUNINGAN

Oktaviani Rita Puspasari<sup>1</sup> Dendi Purnama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Kuningan.

oktavianipuspasari@gmail.com<sup>1</sup>, [dendi.purnama@uniku.ac.id](mailto:dendi.purnama@uniku.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of the implementation of dorp financial system (siskeudes) towards the quality of dorp financial statements, while there are competency of human resources variables, data quality, top management support, system quality and information technology utilization as moderating variables. The population in this study were 361 villages in Kuningan area, while 190 villages being as sample which drawn by using purposive sampling method and slovin formula used on determining sample size. The data analysis technique in this study used moderation regression analysis. The results show that the competence of human resources (HR) and utilization of information technology strengthen the influence of drop financial system implementation towards the quality of financial reports, while the data quality variable, top management support and system quality did not strengthen the influence of drop financial systems implementation towards the quality of drop financial statement .*

**Keywords:** *Siskeudes implementation; Financial statement quality.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, dimana terdapat variabel kompetensi SDM, kualitas data, dukungan manajemen puncak, kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di wilayah kabupaten kuningan sebanyak 361 desa, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 190 desa yang penarikannya dilakukan dengan metode purposive sampling, serta menggunakan rumus slovin dalam menentukan ukuran sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel kualitas data, dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.*

**Kata Kunci:** *Implementasi siskeudes, Kualitas laporan keuangan.*

*Cronicle of Article :Received (October, 2018); Revised (November,2018); and Published (December, 2018).©2018 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.*

**Profile and corresponding author:** Oktaviani Rita Puspasari<sup>1</sup>, M.Si., Ak., CA and Dendi Purnama, M.Si. are lecturers of Accounting Department in Economic Faculty, University of Kuningan. *Corresponding Author:* [oktavianipuspasari@gmail.com](mailto:oktavianipuspasari@gmail.com) dan [dendi.purnama@uniku.ac.id](mailto:dendi.purnama@uniku.ac.id)

**How to cite this article:** Puspasari, O. R. and Dendi Purnama (2018) 'Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan', Jurnal Kajian Akuntansi, 2(2), pp. 26–38. Available at: <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>.

## PENDAHULUAN

Sistem tata kelola yang tepat terhadap suatu institusi maupun lembaga atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) mutlak diperlukan apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Dengan adanya sistem tata kelola yang baik, mengindikasikan kinerja baik dari manajemen sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan lembaga. Sektor pemerintahan tidak terkecuali, dalam hal ini setiap instansi milik pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi serta laporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) yang jelas dan transparan atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para *stakeholder* yaitu masyarakat. Berbagai Peraturan Pemerintah dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Pemerintah daerah dalam hal ini seperti yang dijelaskan pada Pradono and Basukianto (2015) menyatakan bahwa peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat harus dijadikan sebagai acuan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan tertib, ekonomis dan efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektif dan transparan.

Desa sebagai suatu bagian dari pemerintahan, tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya (Septiawan, 2018). Dimana sudah banyak peraturan pemerintah untuk pengaturan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu tonggak baru dalam sistem otonomi desa, dalam UU ini desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri serta termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa.

Penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggungjawab pengelolaan tersebut dari pengelola.

Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengungkapan dalam bentuk laporan digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja aparatur desa serta sebagai media dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Ramadhan, 2014).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah pusat melalui BPKP memberikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien (Rahmawati & Fajar, 2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rusmayanti (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa serta pendokumentasian menjadi lebih mudah karena jumlah berkas yang efisien serta manfaat data yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Sistem informasi pengelolaan keuangan desa sebagai alat terpadu yang dijadikan alat bantu pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengimplementasian berbagai regulasi dibidang pengelolaan keuangan desa

berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel ([www.djk.kemendagri.go.id](http://www.djk.kemendagri.go.id)).

Tata kelola pemerintahan desa termasuk didalamnya pengelolaan dana desa berada dibawah naungan Kementerian Desa. Dimana kualitas laporan keuangan desa juga merupakan indikator untuk penilaian kinerja pemerintah desa khususnya serta kementerian desa pada umumnya (Danuta, 2017). Kualitas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan dapat diukur dengan membandingkannya dengan pendapat dari BPK atas hasil audit yang dilakukan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir audit BPK terhadap kementerian desa menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, namun baru-baru ini terdapat pernyataan dari lembaga independen KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyatakan bahwa hasil audit BPK atas kementerian desa disangsikan kebenarannya karena adanya dugaan suap terhadap oknum BPK. Serta adanya permintaan dari beberapa pihak untuk dilakukan audit ulang. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Kementerian Desa masih kurang bias dipertanggungjawabkan, hal yang sama dapat berlaku pada lini kecil turunannya yaitu proses pengelolaan keuangan serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari setiap desa.

Kuningan merupakan salah satu kabupaten dimana penerapan sistem keuangannya masih belum optimal. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) laporan keuangan dan pertanggung jawaban pemerintah desa masih menggunakan sistem manual dan belum menggunakan sistem keuangan desa yang terkomputerisasi secara online. Akan tetapi, penerapan sistem keuangan desa sudah disosialisasikan pada tahun 2016.

Berdasarkan data DPMD tahun 2016 dari total 32 kecamatan yang ada, hanya 1 (satu) kecamatan yang telah menggunakan sistem keuangan desa yaitu kecamatan Karangancana. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan secara serentak penerapan sistem informasi keuangan desa kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Selain itu dari sumber yang sama, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2016 dari total 361 desa sebanyak 211 desa mengalami keterlambatan pencairan dana desa. Menurut kepala DPMD penangguhan dana desa disebabkan tidak lengkapnya persyaratan administrasi yang merupakan laporan perencanaan dari pengelolaan keuangan pemerintah desa dalam tahun berjalan maupun yang akan datang.

Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan diatas telah dilakukan sebelumnya oleh Kamal and Noermansyah, (2010) yang meneliti SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, dimana hasilnya menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak, kualitas data dan tingkat pemahaman pengguna secara bersama-sama mempengaruhi implementasi sistem keuangan desa. Hasil yang sama pada pengujian terhadap faktor-faktor tersebut ditambah dengan variabel implementasi SIMDA, hasilnya menunjukkan hubungan positif signifikan ketika dihubungkan pada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Al-Hiyari *et al.*, (2013). Berbeda dengan hasil penelitian Alfian (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pengguna tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA, selain itu dukungan manajemen puncak, kualitas data, tingkat pemahaman pengguna dan implementasi SIMDA secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Latjandu *et al.* (2016) mengemukakan

hasil penelitian yang sejalan dengan Yosefrinaldi (2013), mereka menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan DeLone (1992) menyatakan semakin tinggi kualitas sistem maka semakin tinggi kualitas informasi yang akan tunjukkan. Iivari (2005) menjelaskan kualitas sistem sebagai ciri karakteristik sistem yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri.

Pemerintah sudah menetapkan Siskeudes untuk dapat diaplikasikan pada seluruh desa di wilayah Indonesia dengan harapan terdapat keseragaman atas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya keseragaman akan lebih mudah untuk menilai kualitas kinerja dari setiap desa, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan maupun masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak desa-desa yang belum menerapkan Siskeudes yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga fungsi laporan keuangan sebagai media untuk penilaian kinerja pemerintahan desa menjadi kurang optimal, di sisi lain otonomi desa menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa atas penggunaan sumber daya yang telah diamanatkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maupun implementasi Siskeudes yang kemudian berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pada setiap desa. .

## **KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory***

Teori agensi merupakan suatu konsep

yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak *principals* dan pihak *agents*. Pihak *principals* dalam hal ini sebagai pihak yang memberikan otorisasi terhadap pihak agen atau pengelola, untuk bertindak atas nama principal dalam melakukan pengelolaan entitas. kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Implementasi teori agensi pada pemerintahan daerah, yaitu rakyat sebagai pihak *principal* yang memberi kepercayaan kepada agen yang dalam hal ini adalah pemerintah aparat desa untuk mengelola dana dan kekayaan milik desa dengan bijak untuk kemakmuran rakyat.

### ***Decision-Usefulness Theory***

Dalam teori ini mensyaratkan bahwa informasi akuntansi harus memberikan kualitas yang berguna untuk para penggunanya (Staubus, 2000). Implementasi dari teori ini adalah bahwa pemerintah desa harus membuat dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas terhadap setiap pengguna nya untuk memberikan informasi yang berguna bagi setiap pihak yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal.

### ***Stakeholder Theory***

Freeman (1984) dalam Mainardes *et al.* (2011) dalam teori ini menjelaskan setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholder*. Ditambahkan oleh Frederick *et al.* (1992) dalam Mainardes *et al.*, (2011). Penerapan teori stakeholder yang lebih sering dipake di sektor swasta, bisa juga diaplikasikan pada sektor public (pemerintahan) yang sebagian diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan managerial. Pasalnya pemerintah dalam hal ini bekerja sebagai agen ataupun wakil dari masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan utama.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan kualitas laporan keuangan harus dipenuhi oleh setiap sektor pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pemakainya. Terdapat dua kriteria utama sesuai dengan peraturan pemerintah di atas yang dibutuhkan agar manajemen dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban kegiatannya dengan laporan keuangan yang memberikan kepuasan bagi pengguna informasi. Relevansi yaitu setiap informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan desa dalam hal ini harus memenuhi unsur memberikan manfaat umpan balik (*feed back*), memiliki manfaat prediktif berkaitan keputusan dan konsekuensi apa saja yang bisa terjadi pada entitas pemerintah serta tepat waktu. Yang kedua berkaitan dengan keandalan, dimana informasi yang andal yaitu informasi yang dalam penyajiannya jujur, dapat diverifikasi dan netral atau tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu dalam pemerintahan.

### **Sistem Keuangan Desa**

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (BPKP, 2016). Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: Dokumen Penatausahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bukti Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP),

Buku Pajak, Laporan-laporan, Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register.

Sistem aplikasi Siskeudes ini memiliki kelebihan sebagai berikut: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

UU Desa No. 23 Tahun 2014 berisikan tentang semua hak dan kewajiban desa yang diukur dengan nilai uang serta semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang terukur dengan nilai uang atau barang. Adanya hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan unsur pendapatan, pembiayaan dan belanja desa untuk dapat dikelola dengan sistem pengelolaan yang tepat. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik dan taat dalam mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Widodo (2001) dalam (Kharis, 2010) menyatakan bahwa kemampuan SDM untuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan berbekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup dan memadai

merupakan definisi kompetensi SDM. Menurut Sulistyawati dalam Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Agar Pengelolaan keuangan desa baik, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, didukung dengan latar pendidikan akuntansi serta sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sehingga kemampuan SDM menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki untuk dapat menggunakan Siskeudes. Selain itu, pemahaman pemakai tentang teknologi informasi menentukan keberhasilan suatu sistem informasi, sebaliknya ketidakmengertian atau kecemasan pemakai terhadap sistem yang baru dapat menyebabkan kegagalan dalam menggunakan teknologi informasi. Peningkatan pemahaman pemakai mengenai sistem informasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi informasi (Sunarti dan Nur, 1998). Sementara itu, Xu (2003) menyatakan bahwa organisasi harus mempekerjakan individu yang terlatih, berpengalaman, dan berkualitas di semua tingkatan, baik manajemen atas, menengah sampai bawah dengan tujuan untuk memiliki hasil informasi berkualitas tinggi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H1: kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan

### **Kualitas Data**

Sistem keuangan desa (Siskeudes) memerlukan data yang di *input* pada sistem untuk menghasilkan *output* yang diharapkan. Data yang berkualitas merupakan data- data yang memiliki kriteria-kriteria tertentu dan telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu (Sulandri, 2016). Menurut Alfian (2014) SIMDA yang mensyaratkan kriteria-

kriteria tertentu untuk data yang akan digunakan sehingga dengan kata lain SIMDA didesain dengan menerapkan *quality control* data *input* yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Rahayu (2012) menyatakan bahwa data yang berkualitas dapat mempengaruhi *output* dari SIA. Xu (2009) menyatakan bahwa kualitas *output* SIA bergantung dari input yang ada. Selain itu, penelitian Alfin (2014) serta Kamal dan Noermansyah (2015) menyatakan bahwa kualitas data berpengaruh signifikan terhadap implementasi SIMDA. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:  
H2: kualitas data memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan

### **Dukungan Manajemen Puncak**

Cooper, (2006) mendefinisikan komitmen manajemen sebagai keterlibatan pihak manajemen dalam mempertahankan perilaku yang dimiliki dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Peningkatan komitmen manajemen terhadap perkembangan sistem akuntansi dapat berdampak langsung terhadap kualitas implementasi SIA. Implementasi Sistem keuangan desa sebagai aplikasi pengelola keuangan desa pada pemerintah desa memerlukan keterlibatan dan dukungan manajemen puncak. Adanya keterlibatan manajemen puncak dalam penyediaan fasilitas dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan dapat menentukan keberhasilan penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes). Selain itu, manajemen puncak juga dituntut untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan siskeudes. Dukungan manajemen puncak diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi (Sulandari, 2015). Hasil penelitian Rahayu (2012) menunjukkan bahwa komitmen manajemen dan

kualitas data berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi, dengan perlunya peningkatan pada kontribusi komitmen manajemen terhadap kualitas data, selain itu, pengembangan sumber daya kurang mendapat dukungan dari manajemen dalam hal pelatihan dan pendanaan. Kamal dan Noermansyah (2015) menyatakan bahwa implementasi SIMDA dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H3: dukungan manajemen puncak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan

#### **Kualitas Sistem**

Siskeudes sebagai aplikasi pengelolaan keuangan berperan memproses data *input* dan menghasilkan *output* yang diharapkan. Lestari and Asyik (2015) menyatakan bahwa sebuah sistem yang berkualitas memiliki tingkat fleksibilitas sistem yang baik, mampu menciptakan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankannya baik dalam mengoreksi data maupun mengidentifikasi kesalahan atau error dalam aplikasi, serta memiliki keandalan sistem. Iivari (2005) menjelaskan bahwa sistem informasi dicirikan oleh kualitas sistem. De Lone dan Mc Lean (1992) juga menyatakan semakin tinggi kualitas sistem maka kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin tinggi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kualitas sistem memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan

#### **Pemanfaatan teknologi informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan sistem

keuangan desa dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, ditambah ketepatan waktu dalam keakurasian dalam perhitungan serta penyiapan laporan dan *output* lainnya. Selain itu, pengembangan teknologi informasi yang sesuai kebutuhan pada tata kelola pemerintah desa dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya bantuan aplikasi siskeudes yang mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan maka penyajian laporan keuangan pemerintah desa dapat menjadi lebih efisien dan tepat waktu. Latjandu *et al.* (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H5: pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan alasan terjadinya peristiwa serta untuk membentuk, memperdalam, mengembangkan, atau menguji teori (Neuman, 2013). Menggunakan jenis data subjek (*self report data*) yang berasal dari hasil wawancara serta isian hasil kuisioner, dengan respon yang diberikan secara tertulis dan dilaporkan sendiri oleh responden yang berupa opini, sikap pengalaman atau karakteristik data seseorang yang menjadi subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan yaitu sebanyak 361 desa. Dengan unit analisis adalah desa, sedangkan unit observasi adalah

bendahara maupun aparatur desa yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan dan membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban atas dana keuangan desa. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *non probability sampling* (sampel acak). Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 1999). Sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin yaitu,  $n = \frac{N}{1 + N e^2}$  adalah sebanyak 190 desa. Variabel yang dipilih meliputi Implementasi Siskeudes, kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM, kualitas data, kualitas sistem, dukungan manajemen puncak, pemanfaatan teknologi informasi ditentukan pengukurannya dengan menggunakan item-item pertanyaan yang mewakili dari variabel yang digunakan. Analisis terhadap data yang diperoleh dengan melakukan analisis model regresi moderasi untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap sistem keuangan desa (siskeudes) dan kualitas laporan keuangan dilakukan pada objek pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kuningan. Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM, kualitas sistem, kualitas data, dan implementasi sistem keuangan desa, yang digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sedangkan, variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan responden dalam penelitian ini adalah kaur keuangan dan bendahara desa yang mengelola sistem keuangan desa di wilayah kabupaten Kuningan. Jumlah responden yaitu 190 responden.

### Analisis Data

#### Hasil Pengujian Validitas dan reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian yang

dilakukan terhadap hasil isian pertanyaan kuesioner dari masing-masing variabel diperoleh hasil bahwa variabel kompetensi SDM, kualitas data, dukungan manajemen puncak, implementasi sistem keuangan desa, kualitas sistem, pemanfaatan teknologi informasi, serta kualitas laporan keuangan adalah valid dan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat bahwa nilai Z yang dihasilkan melalui *output* SPSS 20.0 adalah sebesar 1,205 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,205. Jika dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05, maka nilai Asymp. Sig. (2-tailed) jauh lebih besar yaitu  $0,205 > 0,05$ . Jika nilai *Kolmogorov-Smirnov*  $Z > \alpha$ , maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil diperoleh dari uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel yang diuji memiliki nilai lebih besar dari nilai alpha ( $\alpha$ ) = 0,05. Secara umum dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan bantuan *software* SPSS 20.0 dapat dilihat nilai VIF untuk setiap variabel yang diuji memiliki nilai  $< 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Berdasarkan hasil uji *RUN Test* pada tabel di atas dengan bantuan *software* SPSS 20.0 for Windows, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,889 yang lebih besar daripada nilai  $\alpha$  (0,05) yang berarti nilai residual menyebar secara acak diterima. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam persamaan regresi. Berdasarkan analisis regresi moderasi dengan bantuan *software* SPSS 20.0, diperoleh hasil perhitungan yang dapat diringkas seperti tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 1 Hasil Regresi**

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig.
(Constant)	31,757		
Implementasi siskeudes	1,412	14,633	0,000
Kompetensi SDM	0,389	3,767	0,000
Moderasi	0,441	3,058	0,003
<i>Adjusted R Square (Adj.R<sup>2</sup>)</i>	0,620		
(Constant)	32,042		
Implementasi siskeudes	1,361	11,645	0,000
Kualitas data	0,311	2,736	0,007
Moderasi	0,203	1,334	0,184
<i>Adjusted R Square (Adj.R<sup>2</sup>)</i>	0,564		
(Constant)	32,261		
Implementasi siskeudes	1,377	14,749	0,000
Dukungan manajemen puncak	0,635	6,469	0,000
Moderasi	0,067	0,486	0,628
<i>Adjusted R Square (Adj.R<sup>2</sup>)</i>	0,632		
(Constant)	32,180		
Implementasi siskeudes	1,355	10,295	0,000
Kualitas sistem	0,212	1,587	0,114
Moderasi	0,014	0,066	0,948
<i>Adjusted R Square (Adj.R<sup>2</sup>)</i>	0,546		
(Constant)	31,803		
Implementasi siskeudes	1,030	8,109	0,000
Pemanfaatan teknologi	0,660	5,189	0,000
Moderasi	0,693	3,979	0,000
<i>Adjusted R Square (Adj.R<sup>2</sup>)</i>	0,633		
Regression		64,800	,000 <sup>b</sup>
Residual			

Sumber: data sekunder diolah (2018)

Berdasarkan *output* SPSS diperoleh nilai t<sub>hitung</sub> variabel moderasi\_X4M1 sebesar 3,058 lebih besar dari nilai t<sub>tabel</sub> sebesar 1,973. dan nilai sig. t<sub>hitung</sub> sebesar 0,003 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara implementasi sistem keuangan desa dengan kualitas laporan keuangan, *diterima*. Berdasarkan hasil perhitungan statistik melalui *software* SPSS 20.0 diperoleh koefisien determinasi *Adjusted R Square (Adj. R<sup>2</sup>)* sebesar 0,620, artinya sebesar 62,0 persen variasi perubahan variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel implementasi sistem keuangan desa, kompetensi SDM dan variabel moderasi\_X4M1, sedangkan 38,0 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan *output* SPSS diperoleh nilai t<sub>hitung</sub> variabel moderasi\_X4M2 sebesar 1,334 lebih kecil dari nilai t<sub>tabel</sub> sebesar 1,973. dan nilai sig. t<sub>hitung</sub> sebesar 0,184 lebih besar dari nilai alpha ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kualitas data berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara implementasi sistem keuangan desa dengan kualitas laporan keuangan, *ditolak*. Berdasarkan hasil perhitungan statistik melalui *software* SPSS 20.0 diperoleh koefisien determinasi *Adjusted R Square (Adj. R<sup>2</sup>)* sebesar 0,564, artinya sebesar 56,4 persen variasi perubahan variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel implementasi sistem keuangan desa, kualitas data dan variabel moderasi\_X5M2, sedangkan 43,6 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan *output* SPSS diperoleh nilai  $t_{hitung}$  variabel moderasi\_X1M3 sebesar 1,334 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,973. dan nilai  $sig. t_{hitung}$  sebesar 0,628 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara implementasi sistem keuangan desa dengan kualitas laporan keuangan, *ditolak*. Berdasarkan hasil perhitungan statistik melalui *software* SPSS 20.0 diperoleh koefisien determinasi *Adjusted R Square* ( $Adj. R^2$ ) sebesar 0,632, artinya sebesar 63,20 persen variasi perubahan variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel implementasi sistem keuangan desa, dukungan manajemen puncak dan variabel moderasi\_X4M3, sedangkan 36,80 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan *output* SPSS diperoleh nilai  $t_{hitung}$  variabel moderasi\_X1M4 sebesar 0,066 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,973. dan nilai  $sig. t_{hitung}$  sebesar 0,948 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara implementasi sistem keuangan desa dengan kualitas laporan keuangan, *ditolak*. Berdasarkan hasil perhitungan statistik melalui *software* SPSS 20.0 diperoleh koefisien determinasi *Adjusted R Square* ( $Adj. R^2$ ) sebesar 0,546, artinya sebesar 54,6 persen variasi perubahan variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel implementasi sistem keuangan desa, kualitas sistem dan variabel moderasi\_X4M4, sedangkan 45,4 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan *output* SPSS diperoleh nilai  $t_{hitung}$  variabel moderasi\_X1M5 sebesar 3,979 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,973. dan nilai  $sig. t_{hitung}$  sebesar 0,000

lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara implementasi sistem keuangan desa dengan kualitas laporan keuangan, *diterima*. Berdasarkan hasil perhitungan statistik melalui *software* SPSS 20.0 diperoleh koefisien determinasi *Adjusted R Square* ( $Adj. R^2$ ) sebesar 0,633, artinya sebesar 63,30 persen variasi perubahan variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel implementasi sistem keuangan desa, pemanfaatan teknologi dan variabel moderasi\_X4M5, sedangkan 36,70 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Hipotesis Kesatu (Kompetensi SDM memperkuat Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan)**

Menurut Guy *et al.* (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Agar Pengelolaan keuangan desa baik, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, didukung dengan latar pendidikan akuntansi serta sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sehingga kemampuan SDM menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki untuk dapat menggunakan Siskeudes.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa yang memiliki sumberdaya manusia yang kompeten, cenderung lebih mudah dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa, dengan kemampuan pengelolaan yang baik terhadap siskeudes akan menghasilkan output yang prima terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini mendukung dugaan yang

menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia memperkuat pengaruh implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan. yang ada sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Banyaknya tuntutan dari pihak eksternal membuat aparat pemerintah desa untuk memahami sistem keuangan desa karena sistem ini dapat membuat kaur keuangan dan bendahara akan lebih fleksibel, efisien dan efektif dalam bekerja sehingga memudahkan dalam proses pelaporan keuangan desa dan pertanggung jawaban desa. Meskipun penerapan sistem keuangan desa masih terkendala dengan selalu adanya perubahan mengenai akun-akun yang dilapangan tidak sesuai dengan akun-akun disiskeudes. Hal tersebut sejalan dengan Choirunisah (2008) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang juga berkualitas.

#### **Hipotesis Kedua (Kualitas data memperkuat Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan)**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa kualitas data tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa. Hal ini tidak sejalan dengan Rahayu (2012) yang menyatakan bahwa data yang berkualitas dapat mempengaruhi *output* dari sistem informasi akuntansi. Serta Xu (2009) yang menyatakan bahwa kualitas *output* SIA bergantung dari input yang ada. Hal ini memungkinkan terjadi karena kriteria dari data yang berkualitas akan disesuaikan dengan tujuan dari laporan keuangan yang akan dihasilkan bagi masing-masing penggunanya. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Alfian (2014) yang menyatakan bahwa data harus memiliki kriteria yang dibutuhkan oleh SIMDA (sistem keuangan daerah) untuk mendapatkan laporan keuangan yang

berkualitas. Kualitas data tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangannya karena data yang berkualitas sendiri akan berpengaruh langsung terhadap implementasi sistem keuangan desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rice (2013), Siregar dan Utama (2005), serta Lee and Choi (2002), yang menyatakan bahwa kualitas data berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Namun kondisi pengimplementasian siskeudes sendiri yang nantinya akan berdampak pada kualitas laporan keuangan.

#### **Hipotesis Ketiga (Dukungan Manajemen Puncak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan)**

Hasil analisis menunjukkan bahwa yaitu dukungan manajemen puncak tidak memperkuat pengaruh implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan dukungan manajemen puncak akan mempunyai dampak pada keberhasilan penggunaan sistem keuangan desa, namun hal tersebut tidak cukup untuk dapat mendukung pengaruh implementasi siskeudes sendiri pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa. Berbeda dengan hasil penelitian Thong, et al. (1996) menyatakan bahwa jika tingkat dukungan manajemen puncak rendah maka manajemen puncak tidak mungkin terlibat dalam aspek pelaksanaan sistem informasi akuntansi (SIA) seperti (tanggapan terhadap rekomendasi konsultan, atau memantau proyek pengembangan SIA tersebut), mereka menemukan bahwa komitmen manajemen meningkatkan efektivitas sistem informasi karena mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek-proyek

pengembangan SIA. Dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak yang cukup akan mendukung pengelolaan sistem informasi akuntansi. Dalam hal ini, dukungan manajemen puncak akan mempengaruhi implementasi sistem keuangan desa namun tidak berarti dengan cukupnya dukungan dari top manajemen dalam implementasi sistem kemudian menjadikan kualitas laporan keuangan akan meningkat.

#### **Hipotesis Keempat (kualitas sistem memperkuat pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas laporan Keuangan)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas sistem yang dimaksud dalam hal ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi (SIA). Grande, et al. (2011) mendefinisikan SIA merupakan alat yang termasuk dalam bidang Teknologi Informasi dan sistem (IT) yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan dan pengendalian topik berkaitan dengan bidang ekonomi-keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem yang secara langsung berdampak pada implementasi siskeudes sendiri, tidak serta merta dapat memperkuat pengaruh dari implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan desa. Karena kualitas laporan keuangan sendiri dapat ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan maupun penurunan kualitas laporannya sendiri. Hal ini bertentangan dengan (Salehi *et.al.*, 2010) yang mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi akan memberikan dampak yang baik dalam peningkatan kinerja individu sehingga dengan adanya sistem akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

#### **Hipotesis Kelima (Pemanfaatan Teknologi Memperkuat Pengaruh**

#### **Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik management dalam memanfaatkan teknologi informasi maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi akan memberikan kemudahan terhadap pemerintah desa dalam melakukan pelaporan maupun pertanggung jawaban publik sebagai bentuk asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa, pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya pemanfaatan teknologi dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat memperlancar pada proses implementasi siskeudes yang dilakukan oleh aparatur desa, dengan kelancaran proses implementasi siskeudes tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jogiyanto (1995) (dalam Harifan, 2009) yang menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Penelitian ini juga sesuai dengan yang dinyatakan oleh Indriasari and Nahartyo (2008) bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi dapat memberikan manfaat dalam pekerjaan karena dapat menghemat waktu dan mempermudah dalam bekerja sehingga waktu akan lebih efektif dan efisien serta pekerjaan akan

dapat terselesaikan dengan cepat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Kualitas data tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Yang artinya kualitas data tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (3) Dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Yang artinya dukungan manajemen puncak tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (4) Kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (5) Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya pemanfaatan teknologi dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.

### **IMPLIKASI**

Implikasi berdasarkan hasil penelitian ini berkaitan teori dan kebijakan. Dimana implikasi teori tidak hanya berkaitan dengan teori sektor publik namun juga

sistem tata kelola tidak lepas dari penerapan *agency theory* atas kemungkinan adanya konflik kepentingan antara masyarakat yang memberikan harapan tinggi terhadap aparatur desa sebagai manajemen untuk dapat memberikan bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan dan dana yang dimiliki desa, disisi lain manajemen merasa mendapatkan beban yang tinggi untuk proses kerja yang mereka lakukan ditambah tuntutan akuntabilitas. Berkaitan dengan implikasi kebijakan dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi sistem berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dimana kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor yang dapat memperkuat pengaruh tersebut. Oleh karenanya pemerintah harus dapat membuat kebijakan untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM serta agar dapat memanfaatkan teknologi yang semakin dikembangkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan yang dapat diambil berupa lebih sering mengadakan pelatihan yang dapat dilakukan secara serentak dengan peserta wakil dari aparatur desa yang diadakan tidak cukup 1 atau 2 kali sekaligus pendampingan terhadap proses implementasi sistem keuangan desa pasca diadakannya pelatihan. Proses tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan beberapa aparatur khusus dari BPKP untuk melakukan pendampingan serta juga verifikasi untuk memastikan semua desa sudah dapat melakukan implementasi sistem dengan tepat dan memantau hasil laporan keuangan yang dihasilkan.

### **KETERBATASAN**

Keterbatasan dalam penelitian ini pada hasil pengisian kuesioner oleh responden belum sepenuhnya memahami tentang isi dari instrumen pernyataan, sehingga dalam menjawab pernyataan bersifat subyektifitas dan mendasarkan pada

persepsi jawaban dari responden yang berbeda dari realita yang sesungguhnya dan bisa berdampak pada biasanya hasil penelitian. Oleh karenanya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian, dan apabila memungkinkan untuk membandingkan juga sistem tata kelola keuangan desa oleh aparatur pemerintah desa di wilayah propinsi (lingkup desa di daerah ibu kota provinsi), untuk dapat membandingkan perluasan informasi dan daya serap aparatur pemerintah desa yang jauh dari kantor pusat pemerintahan daerah dibandingkan dengan kantor pemerintah desa yang mempunyai akses kemudahan dalam hal jarak untuk dapat mempelajari cara implementasian sistem keuangan desa untuk meningkatkan kualitas laporan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hiyari, A., Al-Mashregy, M. H. hamood, Mat, N. K. N., & Alekam, J. M. (2013). Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia. *American Journal of Economics*, 3(1), 27–31. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20130301.06>
- Alfian, M. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo ). *3rd Economics & Business Research Festifal*, (November), 1698–1712.
- Cooper, D. (2006). The Impact of Management ' s Commitment on Employee Behavior: A Field Study. *Proffesional Development and Conference*, 1(317), 7–14.
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2).
- Iivari, J. (2005). An empirical test of the DeLone-McLean model of information system success. *ACM SIGMIS Database*, 36(2), 8–27. <https://doi.org/10.1145/1066149.1066152>
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (n.d.). PENGARUH KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Publikasi*, 2008.
- Kamal, B., & Noermansyah, A. L. (2010). Analisis faktor yang mempengaruhi implemetasi simda dan kualitas laporan keuangan pada skpd. *Jurnal Publikasi Politeknik Harapan*.
- Kharis, A. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT. Avia Avian. *Tesis, Fakultas Ekonomi UPN*.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Ejournal.Unsrat*, 98–109.
- Lestari, A. D., & Asyik, N. F. (2015). Pengaruh kualitas sistem informasi dan pengetahuan akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 20.
- Pemerintah, P. (2010). Standar Akuntansi Pemerintah, 1–2. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN

- IMPLIKASI KEBIJAKAN (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), 22(2), 188–200.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.
- Rusmayanti, A. (2014). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 6(2), 35–39.
- Salehi, M., Rostami, V., & Mogadam, A. (2010). Usefulness of Accounting Information System in Emerging Economy: Empirical Evidence of Iran. *International Journal of Economics and Finance*, 2(2), 186–195.  
<https://doi.org/10.5539/ijef.v2n2p186>
- Septiawan, B. (2018). Keberhasilan Implementasi Sistem E-Procurement pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 23-40.
- Sulandri, D. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN ( Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul ). *Repository Universitas PGRI*.
- Xu, H. (2003). *Critical Success Factors for Accounting Information Systems Data Quality A dissertation submitted by*.
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Ejournal Unp*.